

BAB I

PENDAHULUAN

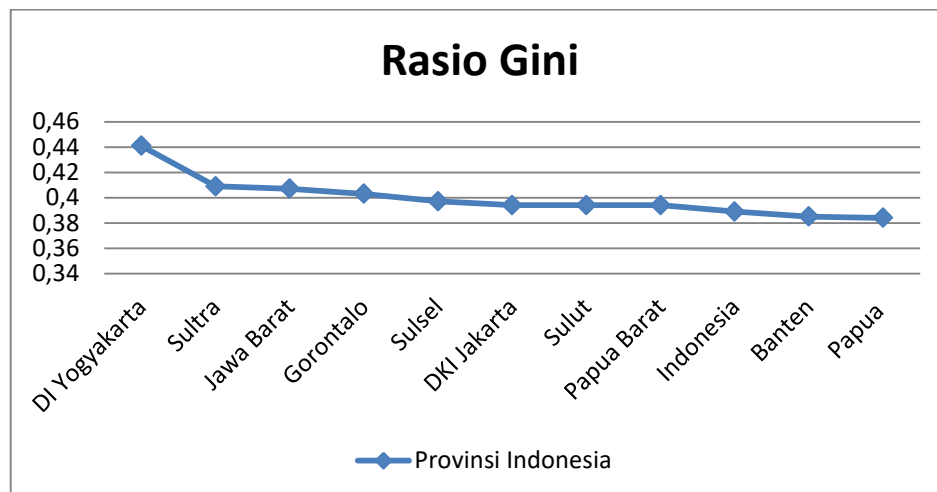
1.1. Latar Belakang

Masalah kesenjangan ekonomi antar kawasan negara maupun antar kelompok pendapatan dalam satu negara tengah menjadi sorotan tajam. Terlebih situasi saat ini perekonomian global berisiko dan tidak pasti. Ketimpangan cenderung berevolusi menjadi mesin yang merusak proses akumulasi modal fisik, pembangunan sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam beberapa kasus ketimpangan terbukti memicu ketidakstabilan politik di mana ujungnya malah berdampak pada volatilitas ekonomi yang menyebabkan situasi perekonomian semakin sulit di prediksi dari waktu ke waktu (Priyono dkk., 2019)

Dalam pembangunan ekonomi selalu muncul polemik dalam menentukan strategi dasar pembangunan. Pilihan antara memprioritaskan pada pertumbuhan ekonomi atau fokus pada pemerataan pendapatan. Masalah ketimpangan distribusi pendapatan merupakan salah satu persoalan yang harus diatasi dalam proses pembangunan. Perkembangan sektor keuangan dinyatakan memiliki pengaruh terhadap ketimpangan juga. Pengurangan ketimpangan menjadi salah satu target dari *sustainable Development Goals* yang ditandatangani oleh 193 negara anggota PBB, termasuk Indonesia.

Tahun 2010, negara-negara berpendapatan tinggi ditaksir menikmati pendapatan 55 persen dari total pendapatan global. Padahal negara tersebut hanya 16 persen dari total populasi dunia. Sedangkan negara-negara berpendapatan

rendah yang dihuni oleh sekitar 72 persen dari populasi global hanya menikmati 1 persen dari keseluruhan pendapatan global. Nilai koefisien gini internasional sebagai refleksi ketimpangan internasional pada 2010 relatif tetap lebih tinggi di bandingkan nilai koefisien gini pada 1980 (Saragih, 2018). Ketimpangan ekonomi sejauh secara umum faktor-faktor penyebab kesenjangan ekonomi dapat di kelompokkan ke dalam dua hal, yakni faktor eksogen (luar negeri) & endogen (dalam negeri). Faktor eksogen memacu kesenjangan ekonomi meliputi globalisasi.



Gambar 1 1 Rasio Gini Indonesia 2017

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Berdasarkan Gambar 1.1. Rasio gini tertinggi pada tahun 2017 yaitu provinsi DI Yogyakarta sebesar 0.44 persen. Selanjutnya yaitu Provinsi Sulawesi Utara bernilai sebesar 0.41 persen . Disusul oleh Provinsi Jawa Barat dengan nilai sebesar 0.4 persen. Kemudian Provinsi Gorontalo, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Papua Barat, Banten, Papua.

Batuo dkk (2010) menunjukkan bahwa meskipun sektor keuangan dapat berkembang, masyarakat miskin tidak memiliki akses yang sama ke kredit dibandingkan dengan orang kaya. Oleh karena itu, bank dan lembaga keuangan lainnya lebih memilih orang kaya daripada orang miskin yang selalu di kucilkan dari sistem keuangan formal, pembangunan sektor keuangan di pandang memperburuk ketimpangan pendapatan. Terlepas dari tingginya ketimpangan yang dialami oleh suatu negara, menarik untuk dicatat bahwa sektor keuangan di kembangkan sesuai dengan standar internasional.

World Bank pada 2015 mencatat laju peningkatan ketimpangan ekonomi di Indonesia paling tinggi di Asia Timur. Survei lembaga keuangan Swiss yaitu *Credit suisses I* pada tahun 2016 menyatakan 1 persen penduduk Indonesia menguasai 49,3 persen kekayaan nasional. Selain itu, dalam temuan Laporan Ketimpangan Indonesia oleh LSM Oxfam pada Februari 2007 menyebut Indonesia sebagai salah satu negara dengan ketimpangan paling parah di dunia. Maka dari itu adanya langkah pemerintah Indonesia terkait keuangan dalam mengurangi ketimpangan ekonomi yaitu berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membentuk beberapa program salah satunya adalah Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Pada bulan Juni 2012 Bank Indonesia bekerjasama dengan kantor wakil presiden (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan/TNP2K) dan kementerian Keuangan mengeluarkan SNKI. Strategi berjalan dengan Forum G20 dalam usaha menurunkan ketimpangan pendapatan (Bank Indonesia, 2014).

Pemerintah menerapkan beberapa kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang berujuan unuk membangun sistem perbankan yang sehat, efisien dan tangguh untuk menyikapi perubahan-perubahan dalam perekonomian, baik domestik maupun global. Beberapa implementasi kebijakan diantaranya, penghapusan pagu kredit dan pemberhentian kredit likuiditas Bank Indonesia (KLBI) pada tahun 1983. Pada tahun 1991, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan pengelolaan bank dalam asas kehati-hatian dan satu tahun kemudian di keluarkan UU perbankan yang memberikan perluasan kewenangan pada BI unuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perbankan. Fungsi pengawasan terhadap perbankan tersebut pada saat ini dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai implementasi dari UU No. 21 tahun 2011, tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Banyak negara yang membuktikan keberhasilan dari kebijakan ekonomi, seperti negara Singapura, Hongkong, Australia dan negara-negara maju lainnya. Kebijakan ekonomi dinegara tersebut secara konsepsional dengan melibatkan pertimbangan dari aspek sosial, lingkungan dan didukung mekanisme politik yang bertanggung jawab sehingga setiap kebijakan ekonomi dapat diuraikan kembali secara transparan, adil dan memenuhi kaidah-kaidah perencanaan. Dalam aspek sosial keberadaan lembaga sosial juga ikut dipelihara bahkan ditingkatkan lagi. Aspek fungsi kelestarian juga sangat diperhatikan demi kepentingan manusia. Pengambilan keputusan harus berjalan dengan bersih dari beragam perilaku lobi yang bernuansa kekurangan (moral hazard) yang dopenuhi dengan kepentingan tertentu dari keuntungan semata. Dengan adanya penerapan aspek-

aspek tersebut hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara adil (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2017).

Literatur tentang perkembangan sektor keuangan dan ketimpangan pendapatan menyajikan dua saluran yang menghubungkan kedua variabel. Saluran langsung dan saluran tidak langsung. Saluran langsung, pembangunan sektor keuangan dipandang dapat mengurangi kendala kredit dan memungkinkan masyarakat miskin mengakses layanan keuangan. Saluran tidak langsung, menunjukkan bahwa pembangunan sektor keuangan mendorong pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan rumah tangga berpenghasilan tinggi dan rendah. Meskipun literatur tentang kemiskinan dan ketidaksetaraan menyajikan pandangan yang bertentangan tentang bagaimana kedua konsep tersebut berhubungan.

Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah identik dengan usaha kecil. Oleh karena itu, dalam penelitian yang dilakukan Navajas dkk (2000) bahwa bank umum dan usaha kecil mempunyai hubungan yang penting di mana sumber dana kredit usaha kecil berasal dari bank umum. selain itu usaha kecil juga menggunakan jasa perbankan tidak terbatas dalam aktivitas pinjaman dan simpanan saja. Lebih jauh lagi, manfaat keberadaan bank di dalam bisnis juga untuk aktivitas transaksi seperti transfer, pembayaran dan sebagainya.

Penelitian yang menganalisis mengenai pembangunan keuangan terhadap ketimpangan pendapatan. Khaliq dkk (2017) melakukan penelitian ketimpangan pendapatan dan demokrasi di Indonesia menunjukan stabilitas demokrasi politik di Indonesia adalah penting menurunkan ketimpangan pendapatan antar pelaku,

kelompok dan golongan pendapatan. Law & Tan (2009) hasil penelitian bahwa kualitas kelembagaan secara statistik signifikan dalam mengurangi distribusi pendapatan di Malaysia. (Beck, Demirguc dkk 2007; Clarke, Xu & Zou, 2006) melakukan penelitian pembangunan finansial dengan memanfaatkan variabel rasio kredit terhadap PDB. Pada konteks yang sama, Kappel (2010) menggunakan variabel kredit yang disalurkan dari pengumpulan dana pihak ketiga yang di himpun oleh perbankan, serta kapitalisasi pasar modal terhadap PDB.

Beberapa penelitian diatas dapat ditemukan *Emperical gap*, yaitu memerlukan evaluasi secara empiris. Hasil penelitian terdahulu menjadi celah untuk dilakukan penelitian selanjutnya, dengan menambahkan variabel Indeks Demokrasi Indonesia dalam mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Stabilitas demokrasi politik di Indonesia merupakan hal yang penting untuk menurunkan ketimpangan pendapatan. Lembaga yang lemah seperti korupsi yang tinggi dan hak milik yang tidak didefinisikan dengan baik kondusif untuk ketimpangan pendapatan, dimana kaum miskin tidak diberi perlindungan dari sistem peradilan yang independen. Mewujudkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas demokrasi politik.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian memiliki rumusan masalah untuk 33 provinsi selama 10 Tahun sebagai berikut:

1. Apakah kredit bank umum berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?

2. Apakah kredit UMKM berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?
3. Apakah angkatan kerja berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?
4. Apakah tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?
5. Apakah indeks demokrasi Indonesia berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?
6. Apakah PDRB riil berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai untuk 33 provinsi selama 10 tahun dalam penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kredit bank umum terhadap ketimpangan di Indonesia
2. Untuk mengetahui pengaruh kredit UMKM terhadap ketimpangan di Indonesia
3. Untuk mengetahui pengaruh angkatan kerja terhadap ketimpangan di Indonesia
4. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan di Indonesia
5. Untuk mengetahui pengaruh indeks demokrasi Indonesia terhadap ketimpangan di Indonesia

6. Untuk mengetahui pengaruh PDRB riil terhadap ketimpangan di Indonesia

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian adalah:

1. Bagi Pemerintah dan lembaga keuangan baik formal maupun non formal dapat memanfaatkan hasil dari penelitian sebagai acuan dalam perencanaan keputusan menciptakan sistem pembangunan keuangan yang ideal bagi Indonesia agar tidak terjadi ketimpangan pendapatan.
2. Bagi penulis, penelitian menjadi media dalam mengaplikasikan keilmuan yang penulis dapat selama belajar di Universitas Trunojoyo Madura
3. Manfaat bagi pembaca penelitian yakni dapat menjadi sumber informasi dan sebagai bahan referensi serta data tambahan dan menambah referensi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan studi mengenai peran *financial development* terhadap ketimpangan pendapatan.